

Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19-[Similarity]

By app. ithenticate.

Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Pada Ibu Hamil Dan Lansia Di Kabupaten Batanghari

Analysis of the Implementation of the Covid-19 Vaccination Policy for Pregnant Women and the Elderly in Batanghari Regency

Aidil Fitrianto¹, Hamzah Hasyim², Misnaniarti³

Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya
e-mail: aidilfitrianto3@gmail.com; hamzah@fkm.unsri.ac.id;
misnaniarti@yahoo.com

ABSTRAK

Risiko komplikasi akibat COVID-19 lebih tinggi pada kelompok masyarakat rentan, seperti lansia dan ibu hamil. Pemutusan rangkaian penularan dan perlindungan terhadap masyarakat dari penularan COVID-19 dapat dilakukan dengan pembentukan *herd immunity* melalui vaksinasi. Distribusi vaksin tidak merata di seluruh dunia, termasuk Indonesia mengakibatkan keterlambatan vaksinasi dan menyebabkan muncul varian baru. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil dan lansia di Kabupaten Batanghari. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan studi kasus. Analisis tematik menggunakan Braun & Clarke. Penelitian ini sebanyak 17 informan diantaranya yaitu Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, Vaksinator, Ibu Hamil, dan Lansia. Lokasi penelitian di Puskesmas Penerokan, Puskesmas Sungai Rengas, Puskesmas Kuranji dan Puskesmas Batin. Waktu penelitian Maret-Mei 2022. Hasil penelitian ditemukan lima tema yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan dukungan masyarakat. Peran komunikasi terdapat tiga subtema yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi dan dari faktor transmisi terdapat subtema yaitu koordinasi. Peran disposisi dijalani secara konsisten dan peran struktur birokrasi adanya Standar *Operating Procedures* Permenkes RI. Peran dukungan masyarakat yaitu sebagian masyarakat mendukung adanya vaksinasi Covid-19, namun masih ada masyarakat yang tidak bersedia di vaksin.

Kata kunci: Kebijakan Vaksinasi Covid-19, Ibu hamil, Lansia.

ABSTRACT

The risk of complications due to COVID-19 is higher in vulnerable groups, such as the elderly and pregnant women. Breaking the chain of transmission and protecting the community from COVID-19 transmission can be done by establishing herd immunity through vaccination. Vaccine distribution is not evenly distributed throughout the world, including Indonesia, resulting in delays in vaccination and causing new variants to emerge. The purpose of this study was to analyze the implementation of the COVID-19 vaccination policy for pregnant women and the elderly in Batanghari Regency. The research method used is qualitative with case studies. Thematic analysis using Braun & Clarke. This study consisted of 17 informants including the Head of the Health Service, Head of the Health Center, Vaccination, Pregnant Women, and the Elderly. The research locations were Penerokan Health Center, Sungai Rengas Health Center, Kuranji Health Center and Batin Health Center. Research time March-May 2022. The results of the study found five themes, namely communication, resources, disposition, bureaucratic structure, and community support. The role of communication has three sub-themes, namely transmission, clarity and consistency and the transmission factor has a sub-theme, namely coordination. The role of disposition is carried out consistently and the role of the bureaucratic structure is the Standard Operating Procedures of the Minister of Health of the Republic of Indonesia. The role of community support is that some people support the Covid-19 vaccination, but there are still people who are not willing to be vaccinated.

Keywords: Covid-19 Vaccination Policy, Pregnant Women, Elderly.

PENDAHULUAN

Menurut *World Health Organization* (WHO) per tanggal 25 November 2021 terdapat 258.164.425 kasus COVID-19 didunia, dengan 5.166.192 kematian (CFR 2,0%) di 204 negara yang terjangkit dan 151 negara transmisi komunitas. Di Indonesia sendiri kasus COVID-19 menurut PHEOC KEMENKES per tanggal 25 November 2021 adalah sebanyak 4.254.443 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan ada 143.766 kematian (CFR : 3,4 %) terkait COVID-19 yang dilaporkan, dan jumlah pasien yg telah sembuh sebanyak 4.102.700 (Annisa, 2021).

Pemutusan rangkaian penularan dan perlindungan terhadap masyarakat dari penularan COVID-19 adalah hal yang penting. Untuk memutuskan transmisi atau penularan virus dapat dengan cara pembentukan *herdimmunity* melalui vaksinasi. Vaksin membantu sistem kekebalan dengan mengidentifikasi dan memerangi virus yang dimaksud. Tubuh yang terpapar kuman/virus ini akan diperlengkapi untuk memusnahkan mereka dan menghentikan penyakit setelah menerima vaksinasi. Selain itu vaksin tidak hanya memberikan perlindungan terhadap pribadi, tetapi juga masyarakat dan kelompok di sekitar (Kemenkes RI, 2020).

Para ilmuwan di dunia telah bekerjasama dan berinovasi untuk membuat vaksin untuk mengakhiri Pandemi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 ini diharapkan dapat menurunkan atau memutus rantai penularan, menurunkan morbiditas dan mortalitas serta memberikan *herd immunity* di kelompok masyarakat. Ketika cakupan vaksinasi di suatu wilayah tersebar merata 67% -80% sehingga terjadi *herd immunity* untuk mengurangi penyebaran penyakit (Green et al., 2021).

Data dari *World Health Organizatin* (WHO) cakupan vaksinasi COVID-19 didunia sudah mencapai 63,5% dari total seluruh penduduk di dunia, Adapun cakupan vaksinasi COVID-19 di Indonesia per tanggal 29 November 2021 adalah sebanyak 138.908.862 orang telah mendapatkan vaksin dosis I atau sebesar 66,70 % dan 94.755.660 orang telah mendapatkan vaksin dosis II atau sebesar 45,50 % dari total sasaran vaksin nasional sebanyak 208.265.270 orang yang terdiri atas lansia, tenaga kesehatan, masyarakat umum, petugas publik, usia 12-17 Tahun, dan Masyarakat Rentan. Sementara itu, risiko komplikasi akibat COVID-19 lebih tinggi pada kelompok masyarakat rentan, seperti lansia dan ibu hamil (Vaksin Kemkes, 2021).

Cakupan vaksinasi COVID-19 tanggal 24 Januari 2022 di Provinsi Jambi untuk dosis 1 sudah mencapai target yaitu sebesar 82,82% dan dosis 2 sebesar 59,43%. Kemudian pertanggal 24 Februari 2022 di Wilayah Kabupaten Batanghari untuk total

sasaran vaksinasi COVID-19 sebanyak 229.537 orang. Kemudian sasaran target vaksinasi untuk lansia yaitu sebanyak 17.557 orang, dosis 1 sebanyak 11.543 orang (65,75%) dan dosis 2 sebanyak 7.543 orang (42,96%). Sedangkan sasaran target vaksinasi untuk ibu hamil itu termasuk didalam kelompok penerima vaksin masyarakat rentan dan umum yaitu sebanyak 159.613 orang, dosis 1 sebanyak 109.896 orang (68,85%) dan dosis 2 sebanyak 77.672 orang (46,66%). Angka ini merupakan cakupan terendah bila dibandingkan dengan target vaksin lainnya seperti pada tenaga kesehatan dan masyarakat umum (Vaksinasi Jambi, 2022).

Covid-19 telah dikaitkan dengan lebih dari 5,9 juta kematian pada 6 Maret 2022, dengan kelompok lansia dan kelompok rentan (ibu hamil) menyumbang 56% dari kematian ini (WHO, 2022). Orang dengan kondisi komorbiditas dan juga lansia adalah populasi rentan yang berisiko meninggal setelah terinfeksi Covid-19 jika mereka menunjukkan gejala yang parah. Kementerian kesehatan mencatat di Indonesia per tanggal 27 Januari 2022 sebanyak 2.484 orang telah meninggal selama wabah varian Omicron di Indonesia. Hingga 73 persen dari kasus yang meninggal belum menerima semua vaksinasi mereka secara lengkap. Kementerian Kesehatan yang menyebut 49% kasus meninggal masuk dalam kategori lanjut usia dan kelompok masyarakat rentan.

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menyebutkan semenjak Omicron meningkat, terdapat Tiga Pasien COVID-19 kategori lansia meninggal yaitu Kabupaten Tanjab Timur, Tebo dan Kabupaten Batanghari. Upaya perlindungan bagi Ibu hamil dan bayinya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui rencana program vaksinasi COVID-19 khusus untuk Ibu hamil. Hal ini seperti yang sudah dianjurkan oleh Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) dengan menjadikan Ibu Hamil sebagai salah satu sasaran program vaksinasi. Meskipun demikian, tidak semua Ibu Hamil dapat di vaksin, hanya yang dapat memenuhi syarat serta kriteria tertentu saja yang di izinkan, seperti rentang usia kandungan 13-33 minggu, tidak dalam pengobatan tertentu, bebas dari pre-eclampsia, tensi normal, dan bebas komorbid. Khusus yang terakhir, masih di perbolehkan jika komorbidnya masih terkontrol (Kemenkes RI, 2020).

Pemberian vaksin kepada Ibu Hamil dilakukan dengan menilik pada meningkatnya kasus infeksi pada Ibu Hamil di berbagai kota besar yang ada di Indonesia dan bergejala berat (*severe case*). Bersumber dari data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, per 26 Juni 2021 terdapat Ibu Hamil yang terkonfirmasi COVID-19 sejumlah 35.099 (Kominfo, 2021). Risiko meningkatnya penyakit menjadi berat dialami oleh Wanita yang sedang hamil dan memiliki Riwayat medis khusus. Oleh karena itu, penting untuk melakukan

vaksinasi kepada Ibu Hamil demi perlindungan Ibu dan bayi yang di kandung dari terinfeksi COVID-19.

Lansia juga termasuk kelompok masyarakat rentan yang memiliki risiko perburukan atau gejala berat jika terinfeksi COVID-19, sehingga vaksin untuk Lansia juga penting untuk dilakukan. Adapun persyaratan bagi Lansia dalam menerima vaksin, seperti persyaratan pada umumnya, tetapi ada beberapa pertimbangan tambahan yang akan di *screening* melalui sejumlah pertanyaan tambahan terkait kondisi fisik mereka pada saat di wawancara. Cakupan vaksinasi untuk Lansia dengan merujuk pada data dari KPCPEN Kabupaten Batanghari per 8 November 2021 ialah sejumlah 4.611 (Kemenkes RI, 2021).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di puskesmas wilayah kerja Kabupaten Batanghari menyebutkan tantangan terbesar pemenuhan cakupan vaksinasi COVID 19 pada ibu hamil dan lansia adalah keraguan pada ibu hamil dan lansia dalam penerimaan vaksin. Sebagian besar ibu hamil dan lansia takut akan efek samping yang terjadi setelah penyuntikan vaksin. Ketakutan masyarakat ini ditambah stigma negatif yang berkembang di masyarakat tentang vaksinasi COVID. Selain itu juga upaya tenaga kesehatan sebagai komunikator, motivator dan fasilitator dalam meyakinkan ibu hamil dan lansia sehingga mau melakukan vaksinasi 611 (Data Batanghari, 2021). Berdasarkan latar belakang diatas, dengan permasalahan ditemukannya kendala dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap Ibu Hamil dan Lansia di Kabupaten Batanghari yang berpengaruh terhadap cakupan vaksinasi maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 pada Ibu Hamil dan Lansia di Kabupaten Batanghari.

Dengan mempertimbangkan data-data yang ada, sangat pentingnya vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil dan lansia dikarenakan merupakan kelompok yang rentan tertular COVID-19, inovasi untuk percepatan vaksinasi COVID-19 (seperti pemberian sembako dan vaksin dilakukan secara *door to door*), selain itu cakupan vaksin yang belum merata karena berbagai kendala, khususnya untuk Ibu Hamil dan Lansia, maka perlu di lakukan analisis dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Ibu Hamil dan Lansia di Kabupaten Batanghari.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Lokasi penelitian dipilih dari 4 puskesmas dengan kriteria yaitu puskesmas dengan

cakupan vaksinasi tertinggi dan puskesmas dengan cakupan vaksinasi terendah yaitu Puskesmas Penerokan dan Sungai Rengas sebagai puskesmas dengan cakupan vaksinasi tertinggi dan Puskesmas Kuranji dan Puskesmas Batin dengan cakupan vaksinasi terendah. Waktu penelitian bulan Maret-Mei 2022.

Adapun dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 17 informan, diantaranya yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari sebanyak 1 orang, Kepala Puskesmas Kabupaten Batanghari sebanyak 4 orang, Vaksinator di Kabupaten Batanghari sebanyak 4 orang, Ibu Hamil sebanyak 4 orang, dan Lansia sebanyak 4 orang. Pemilihan informan di dasarkan atas pada kedalaman pemahaman atau pengalamannya atau dengan kata lain kecukupan informasi yang dimiliki informan. Informan yang digunakan yaitu sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 pada lansia. Kriteria informan yang akan dilakukan wawancara mendalam Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, vaksinator, lansia dan ibu hamil. Informan utama yaitu lansia dan ibu hamil, sedangkan informan pendukung adalah kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas, vaksinator di kabupaten Batanghari.

Analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) yaitu Braun & Clarke (2006), *Thematic analysis* merupakan menganalisis data untuk mengidentifikasi pola atau menemukan tema melalui data yang dikumpulkan oleh peneliti (Braun & Clarke, 2006).

Triangulasi data yang digunakan peneliti berupa triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari narasumber yang berbeda berdasarkan informan yang akan diwawancarai. Triangulasi metode yaitu, menggunakan beberapa metode yaitu metode wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Triangulasi data yaitu, melakukan telaah dokumen untuk membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dengan Nomor 102/UN9.FKM/TU.KKE/2022.

HASIL

Penyampaian informasi dilakukan melalui komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam menyampaikan informasi, maka peneliti di Puskesmas yang ada di Kabupaten Batanghari mengajukan beberapa pertanyaan terkait komunikasi. Ada tiga hal yang peneliti tanyakan tentang komunikasi, transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Wawancara dengan sejumlah informan, terlihat bahwa transmisi informasi dari

pemegang kebijakan telah berjalan dengan baik. Transmisi informasi mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi Covid-19 pada lansia dan ibu hamil dilakukan secara berjenjang di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari berkoordinasi dengan Seluruh pelayanan kesehatan yang melayani vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Batanghari sampai ke tingkat masyarakat. Menurut hasil wawancara tentang tema transmisi komunikasi, terdapat subtema yaitu koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas.

“..Koordinasi: Dinas Kesehatan dan Puskesmas “Yang jelas, komunikasi itu harus berjalan lancar dan efektif. Mulai dari awal kita menerima regulasi tersebut, kita sudah langsung sampaikan kepada puskesmas itu sebelum pelaksanaan. Kalau misalkan koordinasi Kita Puskesmas pasti koordinasi apalagi mengenai rujukan rujukan dari Puskesmas yang ke rumah sakit nya karena dipantau terus sama Dinas Kesehatan..” (KDK)

Hasil wawancara yang dipaparkan informan mengatakan bahwa Puskesmas berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan baik Kabupaten maupun Provinsi berjalan dengan baik.

Tema yang terkait dengan kejelasan adalah kejelasan informasi yang diterima, dan penelitian mengindikasikan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari menyampaikan informasi dalam pesan-pesan yang disosialisasikan yang diterima oleh kepala Puskesmas. Kutipan wawancara berikut menggambarkan hal tersebut:

“kalo ke Puskesmas sih jelas karena puskesmas dan dinas kesehatan kan bekerja sama kuat yaa.. jadi kalo misalnya ada masalah kami tanya ke tim Program Vaksinasi Covid-19 maka tim akan menjelaskan secara detil” (A1)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan informan meyakini bahwa pesan yang disampaikan sudah jelas, karena kepala Puskesmas menyampaikan pesan secara lugas dan ada SOP.

Tema terkait konsisten yaitu konsistensi informasi yang diterima yang mana penelitian mengungkapkan bahwa informasi yang dipaparkan oleh pihak Dinas Kesehatan dalam pesan yang disosialisasikan dan diterima oleh informan konsisten antara juknis dan instrument yang beredar. Kutipan wawancara berikut menggambarkan hal tersebut.

“Regulasi itu sangat dinamis, berubah sejak saat menyesuaikan, sejak saat mulai dari sasaran, kemarin vaksinasi yang pokoknya hanya nakes, kemudian berkembang lagi. Kemudian juga setelah itu baru lansia, kemudian anak dan sebagainya.” (KDK)

Sumber daya yang tercantum di sini adalah semua yang dapat membantu

Kabupaten Batanghari berhasil menjalankan kebijakan imunisasi Covid-19. Sumber daya tersebut meliputi pengetahuan, fasilitas, wewenang, dan sumber daya manusia (staf).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf penanggung jawab pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Batanghari adalah kepala Dinas Kesehatan dan Bupati Batanghari yang bertanggung jawab langsung. Kutipan wawancara berikut menggambarkan hal tersebut.

“saya sebagai kepala dinas kesehatan dan bupati sebagai pemberi mandat”
(KDK)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi proses *screening* di wilayah Kabupaten Batanghari tidak dilakukan dengan maksimal.

“Kendalanya begini, setiap pejabat ini tidak sama ya. Yang pertama pemahamannya saya. Kemudian kemampuan mereka dalam beradaptasi ataupun strategi melakukan sebuah pekerjaan itu tidak sama.” (KDK)

Muncul tema terkait wewenang yaitu wewenang pejabat Dinas Kesehatan. Pejabat Puskesmas mengontrol pelaksanaan kebijakan Vaksinasi Covid-19. Kutipan wawancara berikut menggambarkan hal tersebut.

“Ya kita selalu mengingatkan. Jadi begini, ini harus kita capai. Ini komitmen kita bersama adalah untuk memaksimalkan vaksinasi pada ibu hamil dan lansia karena sebenarnya sudah mengerti ya sudah harus paham bahwa ini adalah kelompok berisiko yang memang harus di capai.” (KDK)

Hasil disposisi berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan vaksinasi Covid-19 pada ibu hamil dan lansia di wilayah Kabupaten Batanghari dengan menjalaninya secara konsisten mematuhi kebijakan dan tidak lengah.

“Ya kita selalu mengingatkan. Jadi begini, ini harus kita capai. Ini komitmen kita bersama adalah untuk memaksimalkan vaksinasi Covid-19 pada ibu hamil dan lansia karena sebenarnya sudah mengerti ya sudah harus paham bahwa ini adalah kelompok berisiko yang memang harus di capai.” (KDK)

“Ya berusaha sebisa mungkin menjalankan sesuai aturan itu ..” (KP02)

Uraian SOP rumah sakit merupakan pokok bahasan yang berkaitan dengan sistem birokrasi. Temuan menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan yang membawahi program imunisasi Covid-19 bertanggung jawab untuk membuat SOP Puskesmas..

“kalau sop itu mbak dari Dinas Kesehatan pemegang program vaksinasi Covid-19 ada, biasanya itu instrumen kebijakan yang mendasari kebijakan Dinas Kesehatan pemegang program vaksinasi Covid-19 pada lansia dan ibu hamil yang pertama dari

Surat Edaran Nomor : Hk.02.02/III/368/2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Pada Kelompok Sasaran Lansia, Komorbid Dan Penyintas Covid-19 Serta Sasaran Tunda dan Surat Edaran Hk.02.01/II/2007/2021 Tentang Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil Dan Penyesuaian Skrining Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19". (KP03)

Hasil wawancara dukungan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat yaitu ibu hamil dan lansia mendukung kebijakan Vaksinasi Covid-19 yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Batanghari. Kutipan wawancara berikut menggambarkan hal tersebut.

"harus vaksin karena di sini kan rawan covid.. ngeri.. sangat mengerikan jadi kalo divaksin bisa mencegah tertular... aku juga menghindari kontak fisik secara langsung.. jaga jarak.." (VP03)

"Ibu hamil dan lansia biasanya pada awal program masih susah diajak untuk vaksin tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak kesadaran, mereka juga sudah paham untuk diingatkan dan tidak marah. Yang agak sulit itu lansia, terkadang keluarga pasien tidak membolehkan karena takut memperparah sakit orang tuanya, padahal kita sudah berikan penjelasan akan dilakukan screening dahulu.." (VP04)

"IYA saya mau divaksin biar tidak kena penyakit covid .." (PVL01)

"Saya sudah divaksin, saya sudah diperiksa dibolehkan oleh dokter" (PVL02)

"Saya sangat mendukung vaksin untuk lansia" (PVL04)

PEMBAHASAN

Menurut Edward III yang dikutip Agustino, variabel pertama yang terkait dengan keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi akan menentukan keberhasilan tujuan implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III, informasi tentang kebijakan publik perlu dikomunikasikan kepada para pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk mengimplementasikan kebijakan agar tujuan kebijakan dapat tercapai sebagaimana dimaksud. Variabel komunikasi meliputi transmisi, kejelasan dan konsistensi (Agustino, 2016).

Komunikasi antar organisasi, dalam implementasi suatu program perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu kebijakan tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya. Dari pendapat diatas maka dapat dijelaskan bahwa komunikasi dan kordinasi merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam mengimplementasikan suatu

kebijakan, hal ini dikarenakan agar organisasi-organisasi yang menjadi mitra kerja dapat bekerja sama dengan baik sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Pelaksanaan sebuah program yang dibuat oleh pemerintah di pengaruhi oleh karakteristik badan pelaksana yang menjalankan kebijakan tersebut, maka hasil temuan penelitian lapangan terkait hal tersebut bahwa proses transmisi komunikasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada ibu hamil dan lansia sudah optimal. Hal ini digambarkan melalui wawancara dengan informan dimana koordinasi komunikasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat Provinsi yaitu Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas hingga ke masyarakat ibu hamil dan lansia (Martini, Kusumawaty, & Yunike, 2021).

Hal ini sejalan dengan penelitian Edward dalam Winarno (2014) yaitu distribusi yang dikomunikasikan dengan baik akan menghasilkan implementasi yang baik. Distribusi komunikasi cenderung bermasalah, yaitu ada kesalahpahaman karena birokrasi multi level yang harus dilalui, tidak ada saluran komunikasi yang jelas dalam prosesnya, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Komunikasi yang terkelola dengan baik sangat perlu dibangun dan dikembangkan saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik saluran komunikasi yang dijalankan, semakin tinggi kemungkinan bahwa perintah akan disampaikan dengan benar (Winarno, 2014). Melalui cara sosialisasi kebijakan, yaitu sosialisasi kepada pihak lain yang berkepentingan. Proses sosialisasi terbagi menjadi beberapa tahapan atau tingkatan, antara lain sosialisasi di tingkat pusat, sosialisasi di tingkat provinsi, sosialisasi di tingkat kabupaten/kota, sosialisasi di tingkat kecamatan, dan sosialisasi di tingkat desa (Fitriyana et al, 2021).

Terkait dengan penelitian yang dilakukan Wardhana yang menemukan bahwa, selain masalah lambatnya pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang dapat berdampak pada implementasi Covid-19 di masa depan, koordinasi dan komunikasi yang buruk antar pemangku kepentingan juga menjadi penyebab hambatan dalam mengendalikan penyebaran Virus Covid-19 saat ini di Indonesia (Wardhana & Kejora Timur, 2021). Oleh karena itu, kolaborasi dan komunikasi yang efektif menjadi komponen penting dalam rencana pencegahan Covid-19 (Arina, 2021).

Hal ini sesuai dengan penelitian (Purwitasari, 2012) dimana kejelasan dan konsistensi program sejalan dengan tujuan, sasaran dan pelaksanaan program Jampersal. Adanya pengaturan fungsi antar lembaga dan perannya masing-masing dijalankan dengan baik (Purwitasari, 2012). Secara umum, tidak tampak hambatan komunikasi, sosialisasi berjalan dengan baik, koherensi antar instrumen kebijakan saling melengkapi, dan kejelasan tujuan dan implementasi program (Hendrastuti, 2021).

Dalam mengimplementasikan kebijakan harus didukung oleh sumber daya, termasuk sumber daya manusia, materi, dan peraturan/pedoman. Meskipun maksud, tujuan, dan isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, implementasi tidak akan berjalan mulus jika para pelaksana kekurangan sumber daya untuk mengimplementasikannya.

Perpres No 18 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Membentuk Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Pengembangan Vaksin COVID-1 9. Tim Pengembangan Vaksin COVID- 19 dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. Pengarah; b. Penanggung Jawab; dan c. Pelaksana Harian 611 (Martini et al, 2021).

Kebijakan tersebut harus didukung oleh sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan material, agar dapat diterapkan. Menurut Munandar, beban kerja adalah beban kerja adalah penugasan yang diberikan kepada pekerja atau karyawan yang harus diselesaikan olehnya pada waktu tertentu dengan memanfaatkan kemampuan dan kemampuannya (Munandar, 2014). Mengingat meningkatnya beban kerja tenaga kesehatan, diperlukan dukungan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Contoh dukungan ini termasuk menegakkan jam kerja yang wajar dan menjamin mereka istirahat yang cukup, memberikan perlindungan fisik dan dukungan psikososial, mengawasi penyakit, stres dan kelelahan. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, tenaga kesehatan harus senantiasa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan sosial, bebas dari penyakit atau kelemahan (Jabbar, 2014).

Hasil penelitian yang telah dilakukan di China di mana dokter dan perawat diwawancarai yang mengaitkan tentang jam kerja yang panjang selama epidemi Covid-19 dihubungkan sebagai faktor risiko infeksi di ranah petugas kesehatan (Wang et al, 2014). Kurang tidur, paparan terus menerus terhadap kasus Covid-19, dan bekerja di bawah tekanan mungkin menjadi faktor penyebabnya. Beban kerja yang meningkat mungkin menjadi penyebab meningkatnya infeksi Covid-19 di kalangan tenaga kesehatan (Makmun & Hazhiyah, 2020).

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Puskesmas memperoleh pengetahuan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan peraturan Vaksinasi Covid-19 kepada seluruh pegawai Puskesmas yang diberikan langsung oleh Tim Pengembang Vaksin. Selain memperkaya wawasan melalui sosialisai dan pendidikan pelatihan, petugas kesehatan sekaligus memperoleh informasi melalui media sosial.

Disposisi pelaksana mengacu pada kepribadian mereka, termasuk pengabdian, kejujuran, dan sifat demokratis mereka. Disposisi yang baik akan memungkinkan implementor menjalankan kebijakan sebagaimana dimaksud oleh pembuat kebijakan. Proses implementasi suatu kebijakan juga tidak akan efektif jika implementor memiliki karakter atau cara pandang yang berbeda dengan pembuat kebijakan (Suhadi, 2015).

Informan memiliki disposisi positif, menurut temuan penelitian yang didasarkan dari hasil observasi dan wawancara. Hal tersebut dikarenakan informan mengaku mengabdikan dirinya untuk merealisasikan kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi di Puskesmas dengan sikap yang dianutnya yaitu dengan melakukan secara konsisten, mematuhi kebijakan, dan tidak gegabah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahri, komitmen RS Salewangang dalam merealisasikan keputusan Menteri Kesehatan untuk melaksanakan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Revisi V sebagaimana perluasan fungsi peran tenaga kesehatan yang merupakan bukti signifikansi melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi (Ahri et al, 2021).

Struktur birokrasi dan organisasi yang bertanggung jawab untuk menjalankan suatu kebijakan tidak dapat dipisahkan. Sifat, harapan, dan pola interaksi yang berulang sering membentuk struktur birokrasi. Hubungan badan eksekutif dengan sumber daya yang mereka miliki untuk mengimplementasikan kebijakan bersifat prospektif dan aktual..

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Implementasi Kebijakan vaksinasi Covid-19 pada ibu hamil dan lansia memiliki SOP. Karena metode kerja yang digunakan di setiap ruangan sama dengan yang digunakan oleh pelaksana, maka dipastikan akan ada konsistensi antar pelaksana berkat SOP. SOP Puskesmas mengacu pada SOP sebagaimana dijelaskan dalam standar teknis. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia merupakan peraturan yang oleh pelapor disebut sebagai perangkat kebijakan dalam kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi pada masa pandemi.

Menurut Jan merse (dalam Kadji, 2008) dukungan masyarakat menjadi salah satu dari empat elemen yang berpengaruh terkait bagaimana kebijakan diimplementasikan. Dukungan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Ia melanjutkan, setiap implementasi kebijakan masih membutuhkan dukungan masyarakat, terbukti dengan rendahnya kepatuhan objek kebijakan ketika ketentuan kebijakan berbenturan dengan keyakinan atau pilihan mereka dan keengganan mereka untuk terlibat dalam kegiatan atau tugas tertentu (Kadji, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa dukungan masyarakat khususnya ibu hamil dan lansia di Kabupaten Batanghari dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 cukup baik. Hal ini dikarenakan ketika masyarakat sudah mendapatkan informasi yang jelas tentang pentingnya melakukan vaksin, selain itu juga adanya dukungan dari keluarga.

SIMPULAN

Kebijakan program vaksinasi Covid-19 bagi ibu hamil dan lansia untuk melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi pada masa pandemi Covid-19 Kabupaten Batanghari telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala dan implementasi kebijakan tersebut, misalnya dari sudut pandang sumber daya, Skrining Covid-19 belum optimal, dan dukungan masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19. Peran komunikasi dalam Implementasi Kebijakan program vaksinasi Covid-19 pada ibu hamil dan lansia di Kabupaten Batanghari terdapat tiga hal yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi dan dari faktor transmisi terdapat subtema yaitu koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas sudah efektif. Peran sumberdaya dalam Implementasi Kebijakan program vaksinasi Covid-19 pada ibu hamil dan lansia di Kabupaten Batanghari yaitu sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan program vaksinasi Covid-19 pada ibu hamil dan lansia di Kabupaten Batanghari. Sumber daya mencakup sumber daya manusia (staf) Subtema dari staff yaitu penanggung jawab kebijakan dan peningkatan pengetahuan staf, informasi terjadi beberapa subtema yaitu screening Covid-19 yang tidak maksimal. Sumber daya dan wewenang pejabat puskesmas dengan mengontrol pelaksanaan kebijakan dan pemenuhan fasilitas penunjang kebijakan sudah baik. Peran disposisi dalam Implementasi Kebijakan Puskesmas dalam program vaksinasi Covid-19 pada ibu hamil dan lansia di Kabupaten Batanghari dijalani secara konsisten. Peran struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan program vaksinasi Covid-19 pada ibu hamil dan lansia di Kabupaten Batanghari yaitu dengan adanya *Standar Operating Prosedures* (SOP) yang berkilat pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peran dukungan masyarakat dalam Implementasi Kebijakan program vaksinasi Covid-19 pada ibu hamil dan lansia di Kabupaten Batanghari yaitu sebagian masyarakat yang mendukung adanya vaksinasi Covid-19, namun masih ada masyarakat yang tidak bersedia di vaksin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, Vaksinator, Pemerintah Desa, Lansia dan Ibu Hamil di Kabupaten Batanghari yang terlibat memberikan kontribusi dan dukungan dalam proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito Albi & Setiawan Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kabupaten Sukabumi: CV Jejak.
- Arina, E. (2021). Strategi dan Tantangan dalam Meningkatkan Cakupan Vaksinasi COVID-19 untuk Herd Immunity. *Jurnal Medika Utama*, Vol 3 No. 10, 1265-1272.
- Glanz, Karen., Rimer Bk, K.Viswanath. (2006). *Health And Health*. 4th ed. Orleans CT, editor. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Hendrastuti, E. S., Noor, E., Riani, E., Damayanthi, E., Alatas, H., Arief, I. I. & Karja, N. W. K. (2021). *Etika Penelitian dan Publikasi Ilmiah*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Jabbar, M. Arif Amiruddin. (2014). *Analisis Visual Kriya Kayu Lame Di Kampung Saradan Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang*. (Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung)
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease COVID-19 Revisi 5*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. *Data Vaksinasi COVID-19 (Update per 25 November 2021)*. <https://COVID19.go.id/p/berita/data-vaksinasi-COVID-19-update-25-november-2021>
- Makmun, A., & Hazhiyah, S. F. (2020). Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin COVID 19. *Molucca Medica*, 13(2), 52-59.
- Malik, R., Indah, D., Wati, D. L., Dewi, S. M., & Budiarmo, L. Upaya Pelaksanaan Dan Pemantauan Kejadian Kipi Pada Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. *Prosiding Senapenas*, 1011-1016.
- Martini, S., Kusumawaty, I., & Yunike, Y. (2021). Persepsi Dan Kesiapan Lansia Menerima Vaksin COVID-19. *Jurnal'Aisyiyah Medika*, 6 (2). 648-659
- Marzuki, I., Bachtar, E., Zuhriyatun, F., Purba, A. M. V., Kurniasih, H., Purba, D. H., & Airlangga, E. (2021). *COVID-19: Seribu Satu Wajah*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*.
- Nurlailah. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 Di Kab. Ogan Komering Ulu. *Jurnal Unbara*, 693, 59-69
- Republik Indonesia. (2020). *Pemerintah Percepat Vaksinasi Ibu Hamil dan Anak*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID_ 19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan

- Savitri, A. (2021). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penerimaan Vaksin COVID-19 Pada Lansia Di Kecamatan Jagakarsa Tahun 2021* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- T. A. P, M. Akbar., Virdani, Diaz, Kasih, Kiki Darma. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 Di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 4(2), 501-510.
- Yang, L., Liu, S., Liu, J., Zhang, Z., Wan, X., Huang, B., ... & Zhang, Y. (2020). COVID-19: immunopathogenesis and Immunotherapeutics. *Signal transduction and targeted therapy*, Vol 5 No. 1, 1-8.
- Wouters, E. (2017). Measuring HIV- and TB-related stigma among health care workers in South Africa: a validation and reliability study. *Int. J. Tuberc. Lung Dis.* 21, 19–25.
- Zulfa, I. M., & Yunitasari, F. D. (2021). Edukasi Generasi Muda Siap Vaksinasi COVID-19. *Jurnal Abdi Masyarakat Kita*, Vol 1 No.2, 100-112.

Submission	28 Juli 2022
Review	18 Agustus 2022
Accepted	15 September 2022
Publish	27 Oktober 2022
DOI	10.29241/jmk.v8i2.1037
Sinta Level	3 (Tiga)

Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19- [Similarity]

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

★ejurnal.stikesprimanusantara.ac.id

Internet

2%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES < 11 WORDS